

**ASPEK YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN
KEMBALI) TERHADAP PUTUSAN YANG BERKEKUATAN TETAP**

SYARIFA NUR / D 101 10 044

ABSTRAK

Suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara perdata belum tentu dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, sebab kadangkala putusan hakim mengandung cacat yuridis akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mencerminkan rasa keadilan. Selain upaya hukum banding dan kasasi yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk membantah putusan pengadilan yakni upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undangan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, baik perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 63 UU No. 3 tahun 2009 telah diatur mengenai alasan-alasan yang dijadikan dalam permohonan peninjauan kembali namun jika diperhatikan secara seksama alasan-alasan yang ada diantaranya seperti yang dirumuskan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Demikian pula masalah pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dengan asas yang mengandung arti bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperiksa atau diputus dua kali, yang maksudnya untuk yang sudah diputus oleh hakim.

Kata Kunci : Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara perdata belum tentu dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, karena kadang kala putusan hakim mengandung cacat yuridis. Hal ini disebabkan hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan sehingga putusan yang dijatuhkannya terhadap suatu perkara seringkali mengandung kekeliruan-kekeliruan ataupun kekurangan-kekurangan, akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pernyataan tersebut telah diungkapkan oleh Sudikno Mertokusurno, bahwa:

“Suatu putusan hakim itu tidak luput dan kekeliruan atau keikhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau keikhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan”.¹

Upaya hukum yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusurno merupakan sarana hukum yang dapat digunakan oleh pihak yang berperkara untuk membantah putusan pengadilan (hakim) yang dianggapnya

¹ Sudikno Mertokusurno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Liberty*, Yogyakarta 1988

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau putusan pengadilan (hakim) yang tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Wahyu Affandi mengemukakan bahwa “putusan hakim yang tidak adil tidak memuaskan masyarakat dan oleh karena itu adalah wajar bila ada yang menilai tidak bermutunya suatu putusan hakim menyebabkan perkara banding dan kasasi meningkat”.²

Ungkapan tersebut di atas adalah sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa pihak yang berperkara yang tidak merasa puas dengan putusan pengadilan selalu mengajukan permohonan banding dan kasasi, akibatnya perkara banding di tingkat Pengadilan Tinggi dan perkara kasasi di Mahkamah Agung senantiasa meningkat.

Selain upaya hukum banding dan kasasi yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk membantah putusan pengadilan, masih ada lagi upaya hukum yang lain yakni peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 UU No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³

Ketentuan-ketentuan pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 dimaksudkan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan demi memenuhi hasrat dan para pencari keadilan, maka disamping kemungkinan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, dibuka pula kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui.

Masalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur lebih lanjut dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni pasal 66 ayat (2) sampai dengan pasal 77. Dalam pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan putusan pengadilan.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilaksanakan (eksekusi) meskipun ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan peninjauan kembali itu diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat menimbulkan permasalahan manakala putusan pengadilan yang dimohon peninjauan kembali sudah dilaksanakan (dieksekusi) dan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan pengadilan tersebut telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang beritikad baik. Dalam hal demikian itu, siapakah yang harus dilindungi oleh hukum, apakah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau pihak yang menerima peralihan obyek sengketa ? hal ini perlu dikaji karena tidak jarang pihak dinyatakan berwenang dalam suatu pengadilan langsung mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain.

Dalarn pasal 67 UU No.3 Tahun sudah diatur mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi jika diperhatikan secara seksama alasan-alasan itu ada diantaranya kurang jelas seperti yang dirumuskan pada huruf a pasal 67 bahwa apabila putusan didasarkan

² Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*. Alumni Bandung, 1981

³ Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1981. Hlm. 102

pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu:

Dari rumusan pasal 67 huruf a tersebut dapat dikatakan mengandung dua unsur, yaitu pertama kebohongan atau tipu muslihat, kedua bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Bilamana unsur pertama kebohongan atau tipu muslihat tidak disyaratkan harus ada putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa pihak lawan telah berbohong atau telah melakukan tipu muslihat dalam perkara. Sedangkan bukti-bukti lain secara tegas dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Dalam artian bukti-bukti lain dimaksudkan dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali manakala ada putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa bukti-bukti itu adalah palsu.

Permasalahan lain bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara (pasal 69 No. 9). Dalam hal ini tidak ada kejelasan bagaimana pemohon untuk memperoleh bukti tertulis mengenai saat diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, apakah saat diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat seketika itu pula pemohon menghadap Ketua Pengadilan agar kepadanya diberikan surat keterangan atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pihak lawan telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dalam perkara.

Dalam pada itu tenggang waktu 180 hari berlaku pula untuk pengajuan permohonan kembali yang didasarkan pada surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (pasal 69 huruf b UU

No.5/2 dalam hal ini tidak ditegaskan dihadapkan siapa pemohon harus mengucapkan sumpah untuk menguatkan tentang hari dan tanggal ditemukan surat-surat bukti dimaksud, siapa yang melakukan sumpah terhadap pemohon dan pejabat yang berwenang mensahkan sumpah. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang mensahkan sumpah, apakah Ketua Pengadilan Negeri atau dapat pula pejabat berwenang lainnya?

Di samping permasalahan-permasalahan yang dipaparkan di atas, dikaji pula mengenai keterkaitan pelaksanaan upaya hukum peninjauan kembali dengan asas yang mengandung arti bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diperiksa atau diputus dua kali. Maksudnya ini untuk menjaga supaya ada kepastian hukum tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim

Dengan demikian menurut asas suatu perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim tidak boleh diperiksa untuk kedua kalinya, jika telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melawan/membantah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Permohonan Peninjauan Kembali

Seperti telah diungkap pada bab terdahulu bahwa putusan dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (verstek), yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan melalui perlawanan hukum biasa, dapat dimohon oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara untuk ditinjau kembali oleh Mahkamah

Agung. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum menurut pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah dibenkan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mencermati ketentuan pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali bersifat limitatif karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga permohonan peninjauan kembali tidak dapat didasarkan pada alasan lain selain yang sudah ditetapkan dalam pasal 67 tersebut. Akan tetapi, apabila dikaji lebih dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang ditetapkan dalam pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 maka ada beberapa diantaranya kurang jelas, hal itu dapat diuraikan berikut ini.

Alasan permohonan peninjauan kembali yang tercantum pada huruf a, dimana dikatakan apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau

tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Dengan demikian ada dua unsur yang terkandung di dalam rumusan huruf a pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 yaitu:

- Didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
- Didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

Apabila disimak secara cermat kedua unsur tersebut, unsur pertama dapat digunakan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali tanpa putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa salah satu pihak (pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata) telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan. Berbeda dengan penggunaan unsur kedua dimana permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon dengan alasan putusan perkara perdata didasarkan pada bukti-bukti palsu disyaratkan harus ada putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa bukti-bukti itu adalah palsu.

Menurut Wijers sebagaimana dikutip R. Supomo mengemukakan bahwa: "Hendaknya jangan tiap-tiap pembohongan dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menerobos putusan hakim yang pasti. Pada tiap-tiap peristiwa, hakim hendaknya mempertimbangkan apakah penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, merupakan cukup alasan untuk memeriksa perkara kembali. Bukan tiap-tiap haluan yang tidak jujur (*oneerlijk*) bersifat penipuan, kata Kamar ke Tiga, Rand Justisi Jakarta, tanggal 12 April 1940"⁴

⁴ Wijers dikutip R. Sopang. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramitha, Jakarta. 1986, hlm. 97-98

Dengan demikian menurut Wijers, mengenai sejauh mana kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dapat dijadikan alasan peninjauan kembali sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim dengan memperhatikan kasus demi kasus. Dalam hal demikian hakim bebas menentukan apakah kebohongan atau tipu muslihat yang dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali dapat diterima atau tidak, jadi tergantung kepada keyakinan hakim.

Kebohongan atau tipu muslihat yang dimaksud huruf a pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009) dapat dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali manakala diketahui setelah perkara perdata yang bersangkutan diputus. Jika kebohongan atau tipu muslihat tersebut telah diketahui sebelum adanya putusan hakim atau perkara perdata itu maka permohonan peninjauan kembali akan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam huruf b pasal 67 UU No. 1 Tahun 2009 ada pokoknya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan “apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat menentukan yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

UU No. 3 Tahun 2009 tidak memberi penjelasan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud surat-surat bukti yang bersifat menentukan, sehingga tidak mustahil penerapan alasan tersebut akan menimbulkan penafsiran diantara para praktisi hukum, oleh karena dan sekian banyak jenis alat-alat bukti surat yang dikenal dalam hukum acara perdata, maka akte autentiklah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat, sampai pembuktian sebaliknya.

Sekalipun demikian, sungguh tidak tepat apabila dengan adanya alat-alat bukti akte autentik lalu orang yang mengajukan permohonan peninjauan kembali sudah pasti dimenangkan dalam artian permohonan peninjauan kembali dinyatakan diterima. Terhadap permohonan peninjauan kembali yang

didasarkan alat-alat bukti autentik Mahkamah Agung harus tetap mempertimbangkan secara saksama kebenaran akte autentik tersebut.

Lain halnya dengan alat bukti sumpah, khusus sumpah *decissoir* dalam hukum acara perdata dikenal mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan menang kalahnya pihak dalam perkara perdata (pasal 183 ayat 3 R.Bg/HIR Pasal 156 ayat 3). Oleh karena apabila salah satu pihak diperintahkan oleh pihak lawannya untuk mengangkat sumpah *decissoir* dan ia bersedia memenuhi perintah tersebut, maka menurut ketentuan di atas pihak yang telah bersumpah sudah pasti dinyatakan menang. Sedang bagi pihak lawannya tidak dibenarkan lagi untuk mengajukan perlawanan (vide pasal 1936 KUH Perdata).

Alasan yang tercantum dalam huruf e pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali didasarkan “apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut”. Alasan ini pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (3) R. Bg/HIR pasal 178 ayat (3), bahwa hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 448 K/SIP/1959 tanggal 30 April 1960 menetapkan bahwa:

“Jawaban tergugat dalam perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya disertai pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tidaklah dapat diperlakukan sesuai gugatan dalam rekonvensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga Pengadilan Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik, menyerahkan kepada penggugat dalam gugat balik pemeliharaan dan pada anak-anak tersebut, telah diberikan putusan atas hal yang tidak dituntut

maka putusannya harus dibatalkan”.

Begitu pula putusan Mahkamah Agung No. 77 K/SIP/1973 tanggal 19 September 1973 yang menetapkan bahwa:

“Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat menggantikan kerugian harus dibatalkan”.

Alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud huruf d pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 yaitu “apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) R.Bg bahwa hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan.

Apabila hakim yang memeriksa suatu perkara perdata ternyata tidak memberi putusan terhadap semua bagian petitum maka dapat dipandang putusan hakim itu adalah tidak lengkap atau tidak sempurna. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 339 K/SIP/1969 tanggal 21 pebruari 1970 bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonvensi.
2. Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagaimana saja dan tuntutan.

Alasan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada huruf e pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 yaitu “apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang tingkatnya telah diberikan putusan yang

bertentangan satu dengan yang lain”. Sesungguhnya untuk adanya dua putusan hakim yang saling bertentangan mengenai obyek dan hubungan hukum serta para pihak yang sama, kecil kemungkinan terjadi praktek. Oleh karena menurut asas yang berlaku dalam hukum acara bahwa terhadap suatu obyek sengketa dan hubungan serta para pihak yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap. tidak dimungkinkan lagi diajukan gugatan untuk kedua kalinya (ne bis in idem). Asas ne bis in idem ini akan dibahas pada bagian khusus dalam kaitannya keberadaan dan penggunaan upaya hukum peninjauan kembali.

Alasan yang terakhir yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu yang tercantum dalam huruf f pasal 67 UU No.34 Tahun 2009 yaitu “apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata”. Mengenai penggunaan alasan ini dapat kita simak dari putusan Mahkamah Agung No. 312 K/SIP/1974 tanggal 19 Agustus 1975 yang menetapkan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dimana putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya yaitu:

- gugatan tidak dimuat
- jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan”.

Dengan demikian apabila putusan hakim tidak memuat isi gugatan dan jawaban-jawaban (replik dan duplik) secara lengkap maka putusan itu dapat dimohon kepada Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali. Oleh karena dalam pasal 184 ayat (1) HIR pada pokoknya ditetapkan bahwa surat-surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan.

Berkaitan dengan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang

dikernukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali yang dikutip dari O. Bidara, dkk, sebagai berikut:

1. MA. Reg. No. 42 PK/Pdt/1985 tanggal 3 Mei 1986

Alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009

2. MA. Reg. No. 40 PK/Pdt/1985 tanggal 26 April 1986

Oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali sudah dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat kasasi, lagi bukan merupakan alasan permohonan peninjauan kembali maka permohonan tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

3. MA Reg. No. 426/PK/Pdt/1985 tanggal 3 Mei 1986

Alasan permohonan peninjauan kembali “bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi telah sah/keliru, karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan atas tipu muslihat” tidak dapat dibenarkan karena yudex facti telah mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang di persidangkan, sehingga putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak didasarkan dalam pasal 67 a UU No.3 Tahun 2009

- surat bukti yang diajukan dengan dalil bahwa surat tersebut merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 b UU No. 3 Tahun 2009 haruslah ditolak karena hanya merupakan foto copy yang tidak dilegalisir secara sah.

4. MA Reg. No. 125 Pk/Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1986

Surat pernyataan tertanggal 5 Juli 1984 dari pr. A. binti K tersebut tidak dapat digolongkan dalam golongan surat-surat bukti baru karena dibuat setelah

adanya putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali.

B. Prosedur Peninjauan Kembali

Terhadap tata cara peninjauan kembali telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2009 yaitu mulai dari pasal 68 sampai dengan 76. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dalam pada itu permohonan peninjauan kembali itu diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan (pasal 70 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009).

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebut se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasan permohonan itu dan dirnasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (pasal 71 UU No. 3/2009).

Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis

(penjelasan pasal 67 huruf a). dalam penjelasan pasal 67 huruf a ini tidak dijelaskan bagaimana cara pemohon untuk memperoleh bukti tertulis mengenai saat diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat. Ketentuan ini merupakan permasalahan yuridis karena akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam penerapannya, sehingga hemat penulis untuk memperoleh kepastian hukum penerapan ketentuan Mahkamah Agung perlu memberikan suatu ketegasan melalui surat keputusan ataupun surat edaran.

- b. Yang disebut pada huruf b, sejak ditemukannya surat bukti, yang hari serta tanggal dikemukakannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seperti halnya ketentuan pasal 67 huruf a, ketentuan inipun kurang jelas karena tidak dijelaskan sesungguhnya siapa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk menyumpah dan mengesahkan surat-surat bukti yang dikemukakan oleh pemohon.

Dalam kaitannya dengan surat-surat bukti yang bersifat menentukan seperti yang dimaksud di atas, Soedirjo menyatakan bahwa:

“Berbeda dengan ketentuan dalam Rv pada ketentuan ini tidak disyaratkan bahwa tidak dapat diketemukannya surat-surat bukti akibat perbuatan pihak lawan. Timbulnya “feitelijkedwaling” dan pihak yang akibat kealpaan atau kelalaian salah satu Pihak”⁵

- c. Yang disebut pada huruf c, d dan f., sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- d. Yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap

dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan maka Panitera berkewajiban memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan dengan maksud:

- a. Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf a dan b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan perlawanan.
- b. Dalam permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan yang tersebut dalam pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui (vide pasal 72 (1) UU No.3/2009)

Terhadap permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon tersebut maka pihak lawan setelah menerima salinan permohonan dapat mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan tersebut. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan surat jawaban itu dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

Di samping itu, permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera mengirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini tidak dijelaskan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pengiriman berkas permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, mulai terhitung sejak kapan, apakah terhitung sejak masuk jawaban pihak lawan atau nanti terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari yang diberikan kepada pihak lawan. Selanjutnya, bagaimana pula permohonan

⁵ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Akademik Pressindo, Jakarta. 1985, hlm. 30

peninjauan kembali yang tidak memerlukan jawaban dari pihak lawan, tenggang waktu 30 hari pengiriman kepada Mahkamah Agung terhitung sejak kapan. Dalam hal permohonan peninjauan kembali yang tidak diperlukan jawaban dari pihak lawan, hemat penulis bahwa jangka waktu 30 hari untuk pengiriman berkas permohonan peninjauan kembali terhitung sejak permohonan tersebut diterima di Pengadilan Negeri.

Setelah seluruh berkas perkara diterima di Mahkamah Agung maka diadakan registrasi dalam buku daftar perkara untuk itu dan sesudahnya diadakan penelitian apakah syarat-syarat kelengkapan berkas dipenuhi. Atas penerimaan pengiriman berkas itu Direktorat/Bidang Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan tanda terima kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan kepada pihak-pihak turunannya.

Atas permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung menentukan suatu majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskannya. Apabila putusan yang dimohon peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung maka hakim-hakim itu ditunjuk adalah bukan hakim yang pernah mengadili perkara yang putusannya dimohon ditinjau kembali itu.

Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dan pengadilan yang dimaksud. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Banding setelah melaksanakan pemeriksaan tambahan maka segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut kepada Mahkamah Agung (vide pasal 77 ayat (1) dan (3) UU No.3/2009).

Apabila menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang

diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan. Menurut ketentuan pasal 74 ayat (1) bahwa dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan (pasal 74 (2) UU No.3 / 2009). Baik menerima maupun menolak permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung harus memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya.

Penegasan dalam pasal 1917 KUH Perdata bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama.

Akibat dari ketentuan tersebut yaitu apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan itu mengikat kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pasal 1917 KUH Perdata menurut Sudikno Mertokusumo bahwa bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan *interventie* maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses.⁶

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat para pihak termasuk pihak ketiga

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hlm. 175

karena adanya *intervenstie* dan *vrijwaring* karena itu mereka harus memenuhi diktum atau amar putusan dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan kedua kalinya. Sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusan No. 588 K/SIP/1973 tanggal 30 Oktober 1973 bahwa:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugatnya yang telah mendapat keputusan dan Mahkamah Agung (putusan tgl 19 Desember 1970 No. 360 K/SIP/1970), maka seharusnya gugatan tidak dapat diterima bukannya ditolak karena telah *ne bis in idem*”.

Sekalipun putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan pada dasarnya tidak dapat diubah, namun hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilapan. Dalam perkara perdata misalnya bisa terjadi bahwa saksi-saksi kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana “sumpah palsu” padahal atas perkara yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali.⁷

Demikian pula Soediiyo mengatakan bahwa dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah demi memenuhi hasrat dan para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum diharapkan melalui setiap putusan hakim, namun kepastian hukum yang dimaksud adalah tentunya yang

mencerminkan keadilan. Jika suatu putusan hakim yang ternyata mengandung kekeliruan tetap juga akan dipertahankan maka berarti telah mempertahankan kepastian hukum yang tidak adil, sedang diketahui kepastian hukum yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Jadi, keberadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Bahkan salah satu alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lainnya (pasal 67 UU No. 3 / 2009).

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas yaitu pada bagian bab-bab, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum luar biasa karena peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dimohon oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung mana kalah terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Bahwa adanya kemungkinan untuk pemnajuan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimaksud untuk memenuhi hasrat pencari keadilan karena suatu hal yang tidak mustahil, hakim sebagai manusia biasa tidak luput dan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadilinya.
3. Alasan upaya hukum peninjauan kembali merupakan pengecualian

⁷ *Ibid.* hlm. 230

⁸ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, Akademik Pressindo, Jakarta. 1985, hlm. 21

daripada ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, karena menurut ini putusan yang telah berperkara dalam artian mereka yang terkena putusan pengadilan tersebut wajib mematuhi atau melaksanakannya.

4. Sekalipun undang-undang membuka kemungkinan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk ditinjau kembali, namun sesuai hasil penelitian penulis bahwa belum ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, ini tentunya Mahkamah Agung telah mempertimbangkan masak-masak alasan pemohon dan akibat hukumnya jika permohonan itu dikabulkan.

B. Saran

Dalam menjamin kepastian hukum terhadap adanya kebohongan/tipu muslihat sebagaimana yang dimaksud huruf a pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 maka dalam tulisan ini disarankan, Mahkamah Agung agar memberikan ketegasan terhitung mulai kapan saat kebohongan atau tipu muslihat yang dimaksud ketentuan tersebut serta cara pemohon untuk mendapatkan bukti tertulis mengenai kebohongan atau tipu muslihat. Demikian pula, harus dijelaskan siapa yang dimaksud pejabat yang berwenang untuk mengesahkan bukti-bukti surat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad , Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya, Alumni Bandung, 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- N. E. Algrat et. al, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Jakarta.
- Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, 1985.
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Bakti, Bandung, 1982.
- R. Subekti dan R. Tjitro Budibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- R. Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soedirjo, Penmjaun Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna, Akademik Pressindo, Jakarta, 1985.
- Wijers Dikutip dan Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Wahyu Affandi, Berbagai Masalah Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, 1981.
- W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

BIODATA PENULIS



Nama : Syarifah Nur
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 1 Maret 1991
Alamat : jl. Jamur (Palu Barat)
e-mail : sjarifahnur@yahoo.co.id
Nomor Hp. : 0852 410 37292